



Djarot Dipanggil Pansus

PANITIA Khusus (Pansus) DPRD DKI Jakarta terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas APBD 2014 mulai bergulir. Tak tanggung-tanggung, pansus yang diketuai Wakil Ketua DPRD Triwisaksana itu langsung memanggil Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat. "Dari temuan tersebut, ada enam permasalahan yang menjadi fokus pansus," ujar Triwisaksana, kemarin (6/8).

Ia mengungkapkan, anggota pansus sepakat melakukan pengawasan tindak lanjut ini. Dari temuan BPK terdapat permasalahan yang signifikan. Ini yang diambil oleh Pansus untuk didalami. "Kita akan bahas dulu permasalahan yang pertama," tutur Triwisaksana.

Pertemuan selanjutnya dilaksanakan secara berkala. Wagub Djarot menyambut baik hal tersebut.

"Akan sangat baik apabila penjelasan yang sangat kronologis ini bisa menjadi rekomendasi sebagai suatu hak Pemprov DKI untuk memberikan tanggapan. Dengan cara seperti itu ada keseimbangan antara hasil pertemuan dan tindak lanjut," ungkap dia dalam rapat pansus.

Sementara itu, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tidak dipanggil dalam rapat itu, menyambut baik berjalannya pansus. "Bagus. Justru harus pansus supaya DPRD itu ngerti bahwa itu ada nota kesepahaman anatara gubernur dengan ketua DPRD. Di situ disebutkan bahwa kebijakan umum anggaran prioritas platform anggaran untuk APBD Perubahan 2014 itu adalah bidang kesehatan," ungkap dia.

Ahok menyebut bahwa salah satu prioritas yakni pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras untuk dijadikan RS Jantung dan Kanker. "Justru di situ supaya pansus bisa membuktikan bahwa tidak ada prioritas bidang penyidikan," sambung dia.

Menurut dia, tidak ada rencana prioritas untuk bidang pendidikan ataupun lainnya dalam APBD Perubahan 2015. Sehingga Ahok merasa heran dengan adanya kemunculan pengadaan UPS.

Pembentukan pansus juga diharapkan dapat mengungkap hal yang sebenarnya dengan jelas dan objektif.

Sehingga tidak ada upaya 'mengadangi' dalam pembahasannya. "Makanya bagus kalau DPRD bikin pansus tapi jangan tertutup-tertutup dong. Biar semua orang tahu, harus terbuka. Wartawan masuk biar

lihat prosesnya," tegas Ahok.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah memprediksi pansus tidak akan menuai hasil maksimal. Sebab ada tahapan-tahapan yang tidak dilaksanakan dewan sebelum membentuk pansus.

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan dan PP 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, seusai BPK melaporkan hasil temuannya dalam sidang paripurna, DPRD segera menjadwalkan paripurna lanjutan untuk mendengar pertanggungjawaban terkait laporan BPK dan pengelolaan APBD 2014.

"Hasil dari pertanggungjawaban gubernur inilah yang nantinya dikonfrontasi dengan laporan BPK. Apabila ada yang tidak sinkron, baru DPRD membuat pansus. Kalau sekarang kan tidak, karena dewan terkesan terburu-buru menembakan peluru melalui pansus. Sehingga hasilnya kemungkinan tidak maksimal," beber Amir.

Ia juga mengingatkan, adanya pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari pansus. Sebab APBD 2014 menggunakan peraturan gubernur, bukan peraturan daerah. Secara otomatis, dewan ikut menyetujui segala program kegiatan yang dilaksanakan pemprov.

Hanya saja, Amir mensinyalir, terdapat segelintir orang yang saat itu belum menjadi anggota dewan, namun kini menjadi pimpinan dewan. "Orang inilah yang mengambil keuntungan terbesar dari pansus, karena dirinya akan terbebas dari apapun hasil pansus, walaupun itu hasilnya menyatakan dewan ikut terlibat dalam penyelewengan," tandas dia.

Bahkan Amir juga mendeteksi keberadaan oknum pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang sengaja menjerumuskan gubernur dan pimpinan dewan dalam kemelut laporan BPK ini. Seperti diketahui, Ketua Tim Anggaran Pemprov DKI Sekda, Kapala BPKAD, dan Kepala Bappeda adalah pihak yang menyusun anggaran dan program. Gubernur dan pimpinan dewan hanya tinggal menyepakati. "Oknum pejabat ini juga patut menjadi sorotan dan bahan evaluasi," pungkas dia. **(wok/pes)**